

Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Satu Peta

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

TERFOKUS
TERUKUR
BERDAMPAK



Perpres
No.54/2018

Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi

- Penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi setiap 2 tahun
- Periode I: 2019-2020
- Periode II: 2021-2022

Perpres
No.55/2012

Strategi Nasional
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Presiden Republik Indonesia

Penanggung Jawab

Tim Nasional

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



- Koordinasi
- Sinkronisasi
- High level meeting
- Evaluasi
- Pelaporan

Koordinator Tim Nasional

Eselon I dari 5 Kementerian/Lembaga

Sekretariat Nasional

Koordinator harian, Tenaga Ahli,
Tim Teknis 5 K/L, Tim Administrasi

Kegiatan harian, fasilitasi,
koordinasi, monitoring, evaluasi

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2021-2022

FOKUS 1 **Perizinan dan Tata Niaga**



Aksi PK 1: Kepastian dan percepatan perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui implementasi kebijakan satu peta (One Map)



Aksi PK 2: Perbaikan Integrasi Data Ekspor Impor pada Komoditas Pangan dan Kesehatan



Aksi PK 3: Pemanfaatan data *Beneficial Ownership (BO)*/Penerima Manfaat untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa

FOKUS 2 **Keuangan Negara**



Aksi PK 4: Percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik



Aksi PK 5: Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik



Aksi PK 6: Peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai

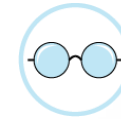


Aksi PK 7: Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

FOKUS 3 **Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi**



Aksi PK 8: Peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di Kawasan Pelabuhan



Aksi PK 9: Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah



Aksi PK 10: Percepatan pembangunan sistem SPBE diseluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

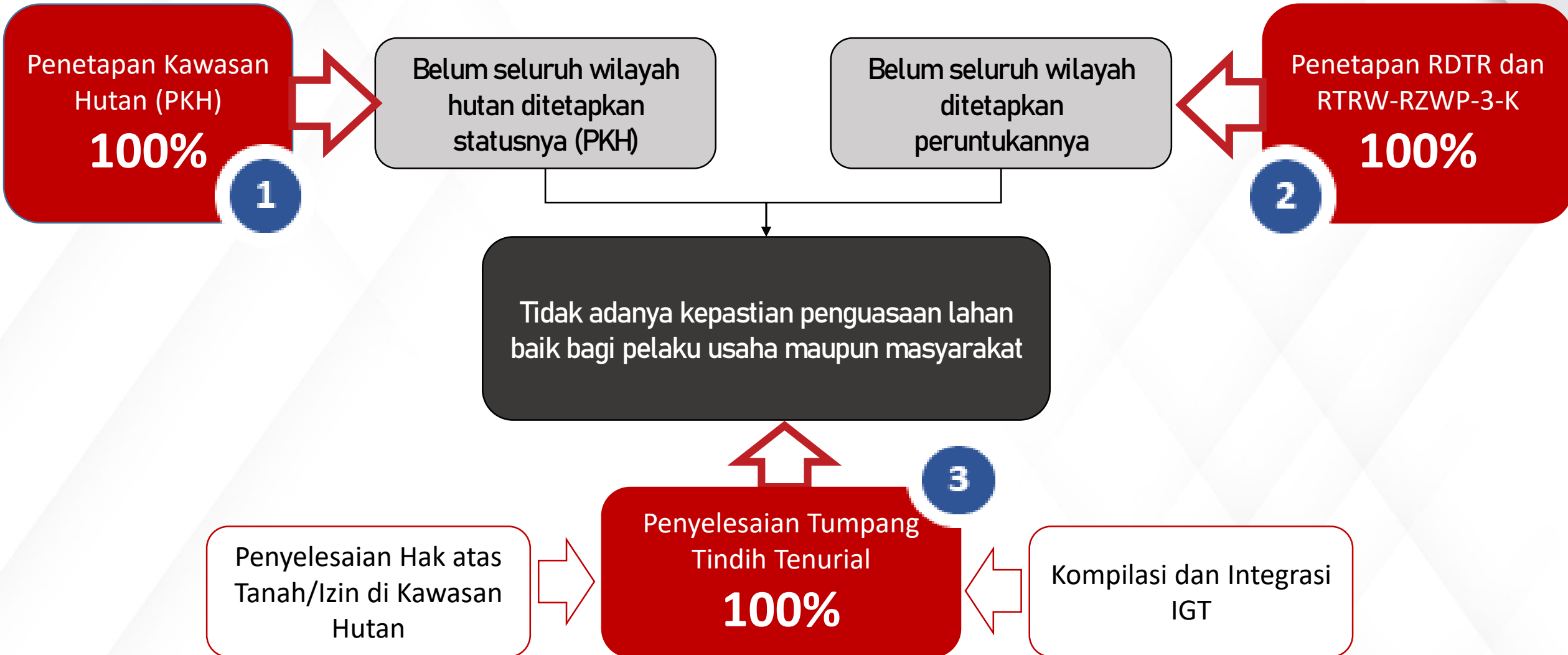


Aksi PK 11: Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi



Aksi PK 12: Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta



Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta 2021-2022

OUTCOME ▴

Tidak adanya tumpang tindih antar izin dan selesainya konflik

OUTPUT ▴

Ditetapkannya kawasan hutan 100% - di 5 Provinsi piloting Kebijakan Satu Peta (KLHK)

Tersedianya **peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS** di 5 provinsi kebijakan satu peta (Kementerian ATR, 42 Kab/Kota)

Terselesaikannya **kompilasi dan integrasi** Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (BIG, Kementan, 4 Provinsi, 28 Kab/Kota)

Terlaksananya **rekomendasi** penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalimantan Tengah (KLHK, ATR/BPN, Kementan, KESDM, Provinsi Kalteng, 14 Kab/Kota)

Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta (KKP, ATR/BPN, 5 Provinsi)

1

2

3

4

5

TARGET ▴

18.056.925 Ha

42 Kab/Kota memiliki RDTR yang terintegrasi OSS

- 23 Kab/Kota selesai integrasi ILOK
- 25 Kab/Kota selesai integrasi IUP
- 4 PITTI (Kaltim, Riau, Papua, Sulbar)
- 28 rekomendasi untuk Kab/Kota di 4 Provinsi

Tindak lanjut rekomendasi di 328 Lokus

5 RTRW Provinsi yang memuat RZWP3K

Kompilasi

- A. Fokus Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang didorong oleh Stranas PK antara lain:
- IGT terkait perkebunan sawit (Izin Lokasi Perkebunan Sawit, Izin Usaha Perkebunan Sawit, Hak Guna Usaha)
 - Izin Usaha Pertambangan
 - Rencana Tata Ruang dan Wilayah
 - Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten,
 - IGT terkait Kehutanan (Penunjukan, Penetapan, Pelepasan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Kesatuan Hidrologis Gambut, Peta Indikatif Penundaan Izin Baru)
- B. Inventarisasi dan Verifikasi data SK izin, lampiran peta dan shapefile

Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, BIG, Provinsi dan Kab/Kota

Integrasi

Penyelarasan Informasi Geospasial Tematik (IGT) terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan standar

BIG dan Walidata KLPemda



Sinkronisasi

- A. Identifikasi tumpang tindih
B. Analisis dan Rekomendasi
C. Pelaksanaan rekomendasi

Kemenko Perekonomian
Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Provinsi dan Kab/Kota



Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Sesuai SK (Ha)	Penetapan sd Des 2020 (Ha)	Belum Penetapan (Ha)
5.406.992	2.117.002 (39,15%)	3.289.990 (60.85%)

Penanggung jawab
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Integrasi RDTR dengan OSS

Kab. Siak, Kab Pelalawan dan Kota Dumai telah memiliki RDTR – belum terintegrasi dengan OSS

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Riau belum memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil



Kompilasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit

No	Kabupaten/ Kota	Izin Lokasi Perkebunan Sawit				Izin Usaha Perkebunan Sawit			
		Checklist	SK	Lamp Peta	Shape file	Checklis t	SK	Lamp Peta	Shape file
1	Kampar	83	53	49	17	71	59	30	56
2	Rokan Hilir	25	22	11	13	24	13	2	2
3	Bengkalis	13	13	12	9	12	12	6	0
4	Pelalawan	47	42	31	22	36	35	17	12
5	Indragiri Hulu	53	38	31	13	55	37	25	16
6	Indragiri Hilir	30	30	23	21	27	24	16	20
7	Rokan Hulu	61	60	49	56	59	49	48	37
8	Siak	22	19	15	6	14	11	3	0
9	Kuantan Singingi	26	24	17	3	25	17	2	0
10	Kota Pekanbaru	7	7	5	6	4	4	0	0
Total		412	313	259	127	366	245	124	95
			76%	63%	31%		67%	34%	26%

Belum ada Kab/Kota yang selesai proses kompilasi

Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Sesuai SK (Ha)	Penetapan sd Des 2020 (Ha)	Belum Penetapan (Ha)
30.387.499	24.689.346 (81,25%)	5.698.153 (18,75%)

Update Jan sd Juni 2021 ada penambahan seluas 287.902 Ha

Integrasi RDTR dengan OSS

Kab. Merauke dan Kab. Jayapura telah memiliki RDTR – belum terintegrasi dengan OSS

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Papua belum memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit

No.	Kabupaten/ Kota	Izin Lokasi Perkebunan Sawit				Izin Usaha Perkebunan Sawit			
		Checklist	SK	Lamp Peta	Shape file	Checklist	SK	Lamp Peta	Shape file
1	Bovendigoel	13	13	4	8	12	8	7	6
2	Jayapura	14	8	4	6	14	10	1	3
3	Keerom	12	10	9	9	12	10	2	7
4	Mappi	3	2	2	2	3	0	0	0
5	Merauke	9	7	8	8	9	8	6	4
6	Mimika	3	3	2	2	3	2	2	2
7	Nabire	4	3	3	3	4	4	2	2
8	Sarmi	4	2	2	0	4	1	0	0
	Total	62	58	38	47	66	46	16	31
			94%	61%	76%		70%	24%	47%

1. Kab Keerom telah selesai integrasi ILOK dan IUP
2. Kab Merauke telah selesai integrasi ILOK

Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Sesuai SK (Ha)	Penetapan sd Des 2020 (Ha)	Belum Penetapan (Ha)
8.383.081	7.970.231 (95,08%)	412.850 (4,92%)

Ditargetkan selesai 2021

Integrasi RDTR dengan OSS

- Kab Kutai Timur telah memiliki RDTR dan terintegrasi dengan OSS
- Kab Kutai Barat telah memiliki RDTR – belum terintegrasi OSS

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Kalimantan Timur belum memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit

No	Kabupaten/ Kota	Izin Lokasi Perkebunan Sawit				Izin Usaha Perkebunan Sawit			
		Checklis t	SK	Lamp Peta	Shape file	Checklis t	SK	Lamp Peta	Shape file
1	Mahakam Ulu	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Paser	57	55	55	57	40	40	36	39
3	Kutai Timur	147	147	147	147	127	127	127	127
4	Kutai Barat	40	40	40	40	34	34	34	34
5	Kutai Kartanegara	73	69	69	73	67	66	61	66
6	Berau	67	64	60	63	39	39	36	37
7	Penajam Paser Utara	12	12	7	8	12	12	1	7
Total		401	392	383	389	330	329	301	321
			98%	96%	97%		100%	91%	97%

- Kab Paser dan Kab Kutai Timur telah selesai integrasi ILOK dan IUP
- Kab Kutai Barat telah selesai integrasi ILOK
- Kab Mahakam Ulu telah selesai kompilasi ILOK dan IUP

Penetapan Kawasan Hutan

Kawasa n Hutan Sesuai SK (Ha)	Penetapan sd Des 2020 (Ha)	Belum Penetapan (Ha)
1.092.376	1.061.994 (97,22%)	30.382 (2,78%)

Ditargetkan selesai 2021

Integrasi RDTR dengan OSS

- Belum ada Kab yang memiliki RDTR

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Sulawesi Barat belum memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil



Kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit

No.	Kabupaten/ Kota	Izin Lokasi Perkebunan Sawit				Izin Usaha Perkebunan Sawit			
		Checklist	SK	Lamp Peta	Shape file	Checklis t	SK	Lamp Peta	Shape file
1	Mamuju Tengah	5	4	3	3	5	5	2	2
2	Pasangkayu	5	5	2	2	5	5	2	2
3	Mamuju	3	3	3	3	3	3	3	3
			100%	100%	100%		100%	100%	100%
Total		16	11	10	9	16	15	8	9
			69%	63%	56%		94%	50%	56%

Kab Mamuju telah selesai integrasi ILOK dan IUP

Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Sesuai SK (Ha)	Penetapan sd Des 2020 (Ha)	Belum Penetapan (Ha)
12.719.707	4.094.156 (32,19%)	8.625.551 (67,81%)

Integrasi RDTR dengan OSS

- Kab Gunung Mas telah memiliki RDTR dan terintegrasi dengan OSS
- Kab Kotawaringin Timur telah memiliki RDTR – belum terintegrasi

Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi

RTRW Provinsi Kalimantan Tengah belum memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil



Penyelesaian Tumpang Tindih IGT (tahap sinkronisasi)

No	Kabupaten/Kota	1		2		3		4	
		Lokus	Sublokus	Lokus	Sublokus	Lokus	Sublokus	Lokus	Sublokus
1	Kotawaringin Timur					13	23		
2	Kotawaringin Barat	1	7	3	12	6	67	3	5
3	Kapuas	1	3	5	12	52	375	12	39
4	Barito Selatan	1	57	5	65	17	64	20	271
5	Barito Utara	1	4	3	8	80		22	44
6	Sukamara	1	69	4	62	1	23	1	78
7	Lamandau	1	41	4	27	4	14	5	42
8	Gunung Mas	1	41	5	39	7	13	18	196
9	Seruyan	1	7	5	14	9	97		
10	Katingan	1	4	5	19	21	105	3	20
11	Pulang Pisau	1	7	4	22	6	21		
12	Barito Timur	1	43	3	34	54	470	54	525
13	Murung Raya	1	2	5	13	48	172	5	10
14	Palangka Raya	1	2	4	8	10	41	5	14
	Jumlah	13	287	55	335	328	1485	148	1244

Kategori tumpang tindih:

1. Tumpang tindih RTRW-P dengan RTRW-K di Non-Kawasan Hutan
 2. Tumpang tindih RTRW (RTRW-P dan/atau RTRW-K) dengan Kawasan Hutan
 3. **Tumpang tindih Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras**
 4. Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras
- rekomendasi untuk kategori 3 telah disampaikan ke Kab/Kota

Saat ini sedang dalam proses verifikasi, updating peta digital oleh KL Pemda untuk lokus dan sub lokus yang terindikasi tumpang tindih

- UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya
- Inpres Moratorium Sawit
- Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit
- Dukungan Masyarakat Sipil

Penguatan Kawasan Hutan

- Informasi penguatan kawasan hutan yang memuat data tata batas (rencana trayek, BA Tata Batas) dan penetapan kawasan hutan pada daerah strategis dan areal konsesi;
- Partisipasi publik dalam penataan batas kawasan hutan, termasuk kanal pengaduan bagi masyarakat.

Integrasi peta Digital RDTR dengan OSS

- Kapasitas Pemda
- SDM dan Anggaran

Kompilasi dan Integrasi

- Minimnya data SK, Lampiran dan Peta Digital ILOK dan IUP Sawit
- Komitmen Pemda dan Perusahaan

Penyelesaian Tumpang Tindih IGT di Kalimantan Tengah

- Aset pemda di Kawasan hutan
- Sawit di Kawasan Hutan
- Hak/Izin di Kawasan Hutan

Integrasi RZWP3K dengan RTRWP

- Teknis Integrasi
- Kapasitas Pemda



STRANAS PK

**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**



Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta - Indonesia



021-25578300 ext. 8014



<https://stranaspk.kpk.go.id>



@stranaspk_official



StranasPK Official

